

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. PPK merupakan pihak yang sangat penting dalam menentukan sukses tidaknya pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Tanggungjawab PPK dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sangat krusial, karena hampir seluruh tahapan pengadaan barang/jasa terdapat peran PPK. Oleh karena itu pejabat PPK harus mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa dan mempunyai syarat manajerial. Tanggungjawab PPK dalam melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sering berhadapan dengan masalah kewenangan dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangundangan.
  
- b. Kedudukan Pejabat pembuat komitmen dalam kontak pengadaan barang/jasa pemerintah dimulai dari meneapkan rancangan kontrak, mengendalikan kontrak dan penyelesaian kontrak, sehingga pejabat pembuat komitmen membutuhkan banyak pemahaman dan atau kemampuan dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, Dimana berhasil dan tidaknya proses penadaan barang dan jasa menuntut suatu keahlian dan ketelitian serta tanggung jawab dari pejabat pengadaan, apabilaterjadi kesalahan dalam pelaksanaannya yang menimbulkan kerugian negara yang berujung pada tuntutan ganti rugi atau tuntutan lainnya.

#### **5.2 Saran**

- a. Dalam upaya memerangi tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, hendaknya para pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa memiliki kesadaran supaya tidak berbuat korupsi, mengingat setiap tahunnya setiap Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Instansi Lainnya (K/L/D/I) selalu mengeluarkan anggaran untuk pengadaan barang/jasa di instansi masingmasing. Selain itu diperlukan juga suatu upaya preventif, yaitu adanya suatu penyempurnaan terhadap peraturan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa supaya lebih dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

b. Mengingat korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah suatu extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), maka diperlukan adanya suatu extra ordinary action, artinya tindakan penanganan terhadap tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah ini harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan membenahi banyak sistem yang berfungsi sebagai pemberi peringatan akan adanya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.